Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
Website:http://jakp.fisip.unand.ac.id|Lisensi:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/|
Email: Jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung

Ai Nunung[1*], Latifah[1],Fatmawati[1], Lalas Sulastri[1]

[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.
[*] Corresponding Author: ainunung@umbandung.ac.id

Article Information

Submitted : 18 Maret 2025
Review : 23 Maret 2025
Accepted : 23 April 2025
Published : 30 April 2025

Keywords

Implementasi, Kebijakan, Bantuan Sosial, Ketidaktepatan

Abstract-

This study applies public policy to investigate the inaccuracy of targeting in the distribution of social assistance in Rancaekek Kulon Village, Bandung Regency. The purpose of this study is to find out how the implementation of social assistance policies is carried out in Rancaekek Kulon Village, what are the factors that cause inaccuracy in targeting in the distribution of social assistance and what is the role of village officials, implementing institutions, and the community in the process of data collection and distribution of social assistance. This study is qualitative and uses primary data with three categories, namely structured, semi-structured, and unstructured interviews, the aim is to understand how the implementation of policies and factors that support or hinder inaccuracy of targeting, including deficiencies in the recipient identification process and the role of village officials. The results of the study showed that there was no data update causing inaccuracy in the distribution of social assistance to the poor, this was due to inadequate implementing personnel, weak coordination between organizations and the implementing structure was not optimal, causing inaccurate targeting of social assistance distribution, so this led to a lack of public trust in village implementers. These findings are expected to provide guidance for stakeholders in improving the implementation of public policies in the distribution of social assistance in Rancaekek Kulon Village, Bandung Regency. Keywords: Implementation of public policy, inappropriate targeting, social assistance

DOI : https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (Bansos) adalah suatu inisiatif penting dan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan serta

kemiskinan masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan harapan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan sosial mencakup pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini bersifat tidak terus-menerus dan selektif, serta dapat berupa uang atau barang yang disalurkan. Disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah, Program Bansos untuk masyarakat Indonesia mencakup Program Keluarga Harapan dan Bansos Rasra/Bantuan Pangan Non Tunai. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, rasionalitas, serta kepentingan masyarakat. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh negara untuk memastikan warganya dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem.

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Edward III (1980) menambahkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat dipengaruhi oleh empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana keempat faktor ini saling mendukung. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan diubah menjadi tindakan nyata, dengan dua faktor utama yang memengaruhi: isi kebijakan dan konteks pelaksanaan. Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan bahwa implementasi adalah proses penyediaan sarana institusional untuk melaksanakan kebijakan, termasuk pengaturan prosedur, sumber daya, dan koordinasi antar instansi, dengan fokus pada desain kebijakan dan struktur kelembagaan pelaksana. Agustino (2006) menekankan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan, dengan penekanan pada pentingnya proses administrasi yang mendukung agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Saragih, D. A., & Ginting, H. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Menggunakan

Model Van Meter dan Van Horn di Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(2), 155-168. "Model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya, terutama dengan mengidentifikasi enam variabel penting dalam implementasi kebijakan ."Putri, R. N., & Nugroho, H. (2020).Evaluasi Implementasi Kebijakan Bansos COVID-19 dengan Pendekatan Van Meter dan Van Horn. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 45–60."Kerangka Van Meter dan Van Horn (1975) relevan dalam menilai implementasi bantuan sosial, khususnya dalam mengidentifikasi variabel yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran."

Rahmatullah R dan yuliani S (2019) Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 89–102. "Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn memberikan dasar analitis untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan inklusi di tingkat sekolah dasar. "Hasanah, U., & Fitrani, E. (2022). Evaluasi Implementasi Program Kartu Prakerja dengan Pendekatan Van Meter dan Van Horn.Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 19(3), 210–224."Model Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi aspek komunikasi dan sikap pelaksana dalam distribusi program Kartu Prakerja. "Wibowo, D., & Sari, M. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijaka Pelayanan Publik di Era Digital: Studi di Dinas Kependudukan. Jurnal Reformasi Administrasi, 8(2), 101–115.

Tujuan dari program perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Relevansinya terhadap urgensi penelitian yaitu APBN sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, Penyediaan Dana untuk Program Perlindungan Sosial, Menentukan Prioritas Sosial dan Ekonomi Pemerintah, Mekanisme Evaluasi dan Akuntabilitas dan Konektivitas Antara Perencanaan dan Implementasi Kebijakan. APBN dan kebijakan bantuan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung. Tanpa alokasi yang memadai dan pengelolaan APBN yang transparan, kebijakan bantuan sosial akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang APBN penting dalam menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan sosial di Indonesia.

Dalam konteks ini, bantuan sosial merupakan elemen dari program dukungan pendapatan minimum pemerintah yang ditujukan untuk rumah tangga dengan

penghasilan rendah. Bantuan sosial, yang sering kali disalahartikan sebagai bantuan sosial dalam pengertian manfaat, sebenarnya mencakup dukungan yang diberikan kepada individu-individu yang rentan secara sosial. Mereka menerima bantuan dalam bentuk uang tunai atau barang dari pemerintah maupun lembaga sosial lainnya. Kelompok masyarakat yang dianggap rentan secara sosial terdiri dari individu-individu yang berisiko tinggi terhadap masalah sosial. Namun, karena mencakup bantuan langsung kepada masyarakat dan subsidi, konsep bantuan sosial memiliki makna yang luas. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dikutip oleh CNBC Indonesia, APBN 2024 mengalokasikan Rp 496 triliun, atau sekitar setengah kuadriliun, untuk bantuan sosial (Bansos). Angka ini lebih tinggi Rp 20 triliun dibandingkan dengan alokasi yang sama pada APBN 2023 yang sebesar Rp 476 triliun (R. A. Nugroho, 2024).

Desa Rancaekek Kulon, yang terletak di Kabupaten Bandung, menghadapi tantangan serupa dengan banyak daerah pedesaan lainnya di Indonesia dalam hal distribusi bantuan sosial dari pemerintah. Salah satu isu mendasar adalah ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan sosial tidak selalu tepat mengenai target dan tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkannya. Dampak dari ketidaktepatan ini sangat signifikan, menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang membebani masyarakat setempat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah

1. Ketidaktepatan Data Penerima (DTKS Tidak Akurat)
2. KKN dan Nepotisme dalam Penentuan Penerima
3. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
4. Tumpang tindih dan Ketidaksinkronan Program
5. Politik Uang dan Pragmatisme Pemilih
6. Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa
7. Keterlambatan dan Ketidakteraturan Penyaluran

Ketidakmampuan dalam menangani isu ketidaktepatan sasaran ini telah menimbulkan ketidakadilan sosial yang mengkhawatirkan di Desa Rancaekek Kulon. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari bantuan sosial sering kali terabaikan, sementara sejumlah kecil individu atau keluarga yang kurang membutuhkan justru menerima alokasi yang tidak tepat. Dalam konteks ini, transformasi kebijakan publik menjadi sangat krusial untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial dan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien.

Penulis berkeinginan untuk mendalami permasalahan ini dengan menekankan pada strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, sehingga membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Melalui analisis yang mendalam tentang studi kebijakan , penulis mengusulkan pemahaman baru serta solusi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruan kebijakan publik di bidang ini. Diharapkan hal ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Rancaekek Kulon.

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa ketidakakuratan dalam penentuan sasaran tidak hanya mengancam keberlangsungan program bantuan sosial, tetapi juga dapat merusak integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga membangun dasar kebijakan yang kuat untuk masa depan. Dengan memperkenalkan konsep-konsep baru, penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman mengenai bagaimana Inflementasi kebijakan publik dapat menciptakan peluang baru untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ini dapat menjadi pedoman yang berharga bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan pihak-pihak terkait dalam upaya bersama untuk mencapai ketepatan sasaran dan kesejahteraan yang lebih inklusif yaitu : Bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial dilaksanakan di Desa Rancaekek Kulon ,Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Dan Bagaimana peran aparat desa, lembaga pelaksana, dan masyarakat dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial.

TINJAUAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan instrumen pengelolaan yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya publik dan dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Pada dasarnya, kebijakan adalah pilihan atau keputusan yang mengatur cara pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, serta manusia demi kepentingan masyarakat umum, termasuk penduduk, komunitas, dan warga negara. Sistem politik suatu negara terdiri

dari beragam ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang saling berinteraksi, bersaing, atau berkompromi untuk menghasilkan kebijakan.

Berdasarkan pendapat Anderson dalam (Widodo, 2021), kebijakan publik terdiri dari beberapa elemen berikut, yang dapat disimpulkan dari definisi-definisi yang telah disebutkan: Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. a. Setiap kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. b. Tindakan pejabat pemerintah, atau pola perilaku, yang tercermin dalam kebijakan. c. Tindakan pemerintah ditentukan oleh kebijakannya, bukan oleh niatnya. d. Dalam konteks tertentu, tindakan pemerintah dapat dianggap sebagai kebijakan publik yang positif, seperti keputusan pejabat untuk tidak mengambil tindakan.

2. Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, bantuan sosial diartikan sebagai pemberian dukungan finansial atau barang secara selektif yang bersifat temporer oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko sosial. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 mengenai Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai sejumlah uang, barang, atau jasa yang disalurkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemampuan ekonomi, dan/atau melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial. Individu atau organisasi dalam masyarakat yang disebutkan berikut ini berhak menerima bantuan sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23:

a. Orang yang harus memenuhi kebutuhan dasar mereka ketika hidup dalam keadaan yang tidak menentu karena situasi sosial, ekonomi, politik, atau bencana alam sebagai individu, keluarga, atau komunitas.
b. Lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk melindungi orang, komunitas, dan/atau kelompok dari potensi risiko sosial di bidang pendidikan, agama, dan sektor terkait lainnya.

3. **Kesejahteraan**

Kapasitas untuk memperluas pilihan dalam hidup didefinisikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagai "partisipasi dalam

pengambilan keputusan publik", termasuk di dalamnya adalah "partisipasi dalam pengambilan keputusan publik". Kesejahteraan, menurut BAPPENAS, merupakan suatu keadaan di mana individu atau kelompok, baik pria maupun wanita, dapat memanfaatkan hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Selain itu, Bank Dunia mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana seseorang tidak lagi merasa miskin, dengan menggunakan kriteria kemiskinan PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari. Kemampuan beli uang di suatu negara untuk memperoleh barang dan jasa yang setara di negara lain dikenal sebagai PPP, atau paritas daya beli. "Kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya," demikian bunyi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), metode kualitatif digunakan untuk menyelidiki keadaan objek yang bersifat alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna dari isi yang diteliti, bukan pada generalisasi objek tersebut. Burhan dalam Bungin (2007) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat sebagai objek penelitian, serta mencari cara untuk mengungkapkan realitas tersebut dari berbagai perspektif, karakteristik, dan desain yang berkaitan dengan kondisi atau fenomena tertentu. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif atau verbal mengenai individu dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Dengan teknik pengumpulan data secara spesifik (misalnya: wawancara, observasi, dokumentasi) akan memperkuat kredibilitas metode kualitatif yang digunakan.

Tujuan utama penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk memahami secara mendalam proses, makna, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik kebijakan di tingkat lokal. Secara lebih spesifik, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali persepsi dan pengalam antar aktor, menelusuri proses implementasi kebijakan di lapangan, mengidentifikasi factor penyebab ketidaktepatan sasaran ,

mengungkap hubungan kekusaan dan praktik informal dan membangun pemahaman kentekstual dan holistik.

Untuk mengintesvigasi ketidak tepatan sasaran Bansos Di Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung maka penulis akan memakai model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berinteraksi :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives):
2. Sumber Daya (Resources):
3. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (Inter-organizational Communication and Enforcement Activities):
4. Karakteristik Badan Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies):
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Environment):
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of Implementers**)**

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan dalam penelitian saat ini, karena kerangka analisis yang sistematis, komprehensif, dan fleksibel untuk diimplementasikan di lapangan , dapat Memberikan kerangka analisis yang kuat dan terstruktur, Relevan di berbagai konteks dan level pemerintahan, Cocok untuk menjelaskan kegagalan dan keberhasilan implementasi dan dapat diadaptasi dan dikombinasikan dengan model atau pendekatan lain

Wawancara berfungsi untuk mengumpulkan data primer. Menurut Sugiyono (2011), terdapat tiga kategori wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, dan pendekatan penelitian ini termasuk dalam kategori tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini adalah petugas pelaksana sebagai penanggungjawab implementasi kebijakan Bantuan Sosial yaitu Kepala Desa Rancaekek Kulon, RT RW dan Masyarakat sebagai penerima manfaat implementasi kebijakan Bantuan Sosial . Informan berasal dari 3 Rukun Warga dan masing-masing 6 (enam) orang informan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang masyarakat penerima bantuan sosial tersebut. Wawancara dilaksanakan selama satu bulan .

Analisis sebagai bahan dan perbandingan penelitian yaitu Reduksi data yaitu melakukan wawancara dengan perangkat desa ,RT RW dan penerima bantuan, penyajian data yaitu dengan mencatat sumber daya dan anggaran yang tersedia di Desa tersebut dan terakhir membuat sebuah kesimpulan mengapa implementasi

kebijakan bansos di Desa Rancaekek Kulon mengalami ketidaktepatan sasaran , kenapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut .Lokasi penelitian berada di Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung. Peneliti menerapkan purposive sampling di mana peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian. Untuk memperoleh informasi yang kaya, mendalam, dan relevan dari individu atau kelompok yang benar-benar memahami persoalan atau terlibat langsung dalam konteks kebijakan atau fenomena yang dikaji yaitu Kepala Desa, Penerima bantuan social dan tokoh Masyarakat atau RT/RW.

Dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis sebagai bahan dan perbandingan penelitian yaitu Reduksi data yaitu melakukan wawancara dengan perangkat desa dan penerima bantuan, penyajian data yaitu dengan mencatat sumber daya dan anggaran yang tersedia di Desa tersebut dan terakhir membuat sebuah kesimpulan mengapa implementasi kebijakan bansos di Desa Rancaekek Kulon mengalami ketidaktepatan sasaran , kenapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Analisis di lapangan terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung ,terungkap beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penulis akan memakai model " Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) " yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa enam variabel yang saling berinteraksi yaitu :

1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives):

Dalam penelitian tentang ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon, hasil penelitian menunjukkan bahwa data penerima bantuan tidak diperbarui, sehingga tujuan kebijakan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin tidak tercapai. Setelah dievaluasi tujuan implementasi kebijakan tidak bisa menurunkan angka kemiskinan . karena tujuan implementasi kebijakan tidak memberikan dampak

positip kepada kelompok sasaran maka implementasi kebijakan tersebut tidak efektif kaena dilapangan banyak penerima bantuan social bukan berasal dari kelompok maskin .

a. Informan: Kepala Desa Rancaekek Kulon

Pertanyaan: Apa standar dan tujuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di desa ini?

Jawaban:

> *"Tujuan utama tentu membantu masyarakat miskin, terutama yang terdampak pandemi dan krisis ekonomi. Tapi dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari pusat. Masalahnya, data itu sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Banyak warga yang sebenarnya sudah mampu, tapi masih terdata sebagai penerima."*

b. Informan: Ketua RT 03/RW 05

Pertanyaan: Menurut Bapak, apakah standar penerima bantuan sudah jelas dan sesuai?

Jawaban*:*

> *"Standar secara tertulis sih ada, seperti penghasilan di bawah UMR, rumah tidak layak, dan lain-lain. Tapi di lapangan, kadang nggak cocok. Ada warga yang benar-benar miskin tapi tidak dapat bantuan karena tidak masuk data. Kami pernah usul perubahan data, tapi responnya lama sekali dari dinas."*

c. Informan: Penerima Bantuan Sosial (Perempuan, 45 tahun)

Pertanyaan: Apakah Ibu merasa bahwa tujuan bantuan ini tepat sasaran?

Jawaban:

> *"Alhamdulillah saya dapat bantuan, tapi ada tetangga saya yang lebih susah malah nggak dapat. Dia janda, tinggal sama anaknya yang masih kecil, rumahnya pun reot. Jadi menurut saya belum adil, masih banyak yang perlu dibantu."*

1.2 Sumber Daya (Resources):

Berdasarkan data lapangan dari wawancara dan observasi di Desa Rancaekek Kulon, ditemukan beberapa isu terkait sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan sosial:

1.2.1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia

> *"Di desa kami hanya ada satu orang operator yang mengelola data bantuan. Itu pun Masih merangkap pekerjaan lain, jadi sering kewalahan "*

Hasil penelitian dilapangan terdapat jumlah petugas sangat terbatas, sementara beban kerja sangat tinggi,Ini berdampak pada ketidaktepatan dan keterlambatan pembaruan data penerima bantuan.Tujuan kebijakan sulit tercapai jika tenaga pelaksana tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon belum didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari

aspek manusia, keuangan, informasi, maupun teknologi.Tanpa pemenuhan sumber daya yang memadai, tujuan dan standar kebijakan tidak akan efektif tercapai.

1.2 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (Inter-organizati Communication and Enforcement Activities)

Hasil penelitian di lapangan menemukan berbagai kesenjangan komunikasi dan lemahnya koordinasi antar organisasi yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

a. Kurangnya Koordinasi antara Desa dan Dinas Sosial

> *"Kami sering kirim usulan perubahan data penerima bantuan, tapi jarang ditanggapi oleh Dinas Sosial. Bahkan tidak ada kejelasan kapan data akan diperbarui." (Wawancara dengan perangkat desa)*

Komunikasi bersifat satu arah: desa menyampaikan, tapi tidak mendapat respon yang cukup dari dinas, Tidak ada sistem umpan balik yang efektif, Menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam memperbarui daftar penerima bantuan.

b. Tidak Jelasnya Alur Informasi antar Level Pemerintahan

> *"Seringkali kami menerima surat edaran dari pusat, tapi tanpa ada penjelasan teknis dari kabupaten. Kami jadi bingung harus menerapkan seperti apa." (Wawancara kepala Desa)*

Informasi yang diterima dari pusat tidak dijelaskan secara kontekstual di tingkat lokal, Kurangnya pendampingan teknis dan operasional dari tingkat kabupaten ke desa ,membuat implementasi di tingkat desa tidak seragam dan rawan kesalahan.

c. Aktivitas Pelaksana Terhambat oleh Lemahnya Komunikasi Internal

> *"Kadang RT tidak diberi tahu kalau ada pembaruan data, akhirnya tidak ikut mendata. Padahal mereka yang tahu kondisi warga" (Wawancara Ketua RT)*

Dengan adanya kekurangan komunikasi antara aparat desa dan perangkat di bawahnya (RT/RW) , Membuat aktivitas pelaksana seperti verifikasi dan pendataan tidak efektif atau tidak menyeluruh, Ini mengganggu akurasi data dan pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian di Desa Rancaekek Kulon menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana berperan besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial. Tantangan yang ditemukan antara lain: Struktur organisasi yang tidak fokus dan overload tugas, Kompetensi teknis SDM yang terbatas, Komitmen kerja yang tidak merata di antara pelaksana, Lemahnya komunikasi dan koordinasi internal. Hal ini menyebabkan gap antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan, serta terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.

1.3 Karakteristik Badan Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies):

a. Hasil wawancara dengan Perangkat Desa

> *"Kami masih pakai data yang dulu, belum diperbarui karena belum ada pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut. Kadang bingung juga cara input ke sistem."*

Hasil Wawancara (Ketua RT):

> *"Kadang warga yang sudah mampu masih dapat bantuan karena dulu pernah masuk DTKS. Susah ngubah datanya kalau tidak ada musyawarah resmi."*

Hasil Wawancara (Warga Penerima Bansos):

> *"Saya dapat bantuan rutin, tapi tetangga saya yang lebih butuh malah tidak dapat. Saya juga tidak tahu ke mana harus lapor."*

Pelaksanaan bansos di Desa Rancaekek Kulon menunjukkan bahwa:Struktur pelaksana sudah terbentuk, tetapi pelaksanaannya belum optimal ,Banyak masalah muncul dari lemahnya kapabilitas SDM, rendahnya transparansi, dan minimnya koordinasi lintas Lembaga dan Pendataan masih cenderung subjektif dan tidak berbasis pembaruan data yang akurat.

1.4 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Environment):

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Desa Rancaekek Kulon turut membentuk praktik implementasi kebijakan bantuan sosial, bahkan dalam beberapa hal memperburuk ketidaktepatan sasaran.

a. Ketimpangan Sosial dan Kecemburuan Antarwarga

> *“Seringkali warga yang tidak dapat bantuan merasa iri dengan tetangganya. Apalagi Kalua yang dapat itu sebenarnya hidupnya lebih enak “ (Wawancara Ketua RW).*

Kondisi sosial masyarakat yang heterogen dalam tingkat kesejahteraan menimbulkan kecemburuan dan konflik horizontal ,Ketika kebijakan tidak adil atau tidak transparan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun. Ini menciptakan ketegangan sosial yang menghambat efektivitas kebijakan.

b. Kemiskinan Struktural dan Ketergantungan terhadap Bantuan

> *“Sebagian besar warga masih mengandalkan bantuan karena penghasilan dari buruh Dan tani tidak menentu „ (Wawancara dengan staf desa).*

Kondisi ekonomi masyarakat desa masih lemah, terutama di sektor informal seperti buruh pabrik, buruh tani, dan pedagang kecil, Ketergantungan terhadap bantuan sosial tinggi, yang menjadikan bantuan bukan lagi sebagai intervensi sementara, tetapi

sebagai sumber pendapatan rutin ,Hal ini menimbulkan tekanan sosial agar setiap warga "berusaha masuk" dalam daftar penerima bantuan, termasuk dengan cara manipulatif.

1.5 Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of Implementers):

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan di tingkat desa dan RT/RW sangat beragam, dan hal ini berpengaruh signifikan terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

a. Pemahaman Terbatas terhadap Tujuan Kebijakan

> *"Kami hanya terima data dari atas, dan disuruh bagikan sesuai itu. Tidak terlalu Tahu kenapa orang A dapat orang B tidak " (Wawancara dengan perangkat desa)*

Pelaksana kebijakan tidak memahami secara menyeluruh tujuan dan prinsip kebijakan, Mereka lebih berperan sebagai eksekutor administratif, bukan aktor yang kritis dan aktif dalam proses implementasi ,Ini menyebabkan sikap pasif dan tidak ada upaya korektif saat terjadi penyimpangan data.

b. Motivasi Pelaksana Rendah karena Minim Insentif

> *"RT kami tidak digaji khusus untuk urusan bantuan, jadi kalau ada yang tidak didata ya mungkin karena capaek atau tidak sempa "(Wawancara Kepala Desa).*

Rendahnya insentif atau penghargaan terhadap petugas pelaksana (terutama di level RT/RW) menyebabkan rendahnya motivasi dan semangat kerja.Kinerja pendataan dan verifikasi menjadi tidak konsisten dan tidak serius, Ini berkontribusi terhadap kesalahan atau ketidaktelitian dalam proses pelaksanaan.

c. Adanya Praktik Nepotisme atau Ketidaktegasan Moral

> *"Kadang RT lebih pilih kasih, yang dekat lebih diutamakan. Warga jadi tidak percaya lagi sama pendataan " (Wawancara warga penerima).*

Sebagian pelaksana memiliki disposisi moral yang lemah, sehingga bersikap tidak objektif dalam pelaksanaan kebijakan, Praktik pilih kasih atau manipulasi data penerima menggerus kepercayaan masyarakat dan merusak legitimasi kebijakan. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial dan lemahnya efektivitas kebijakan.

2. Kecemburuan Sosial Dalam Masyarakat Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Sebagai Akibat Yang Timbul Dari Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial

Kecemburuan sosial dalam konteks bantuan sosial merupakan fenomena kompleks yang dapat memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam

konteks distribusi bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. Hubungan langsung Kecemburuan sosial dengan ketidaktepatan sasaran terjadi ketika Warga yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkannya (*exclusion error*), atau Warga yang seharusnya tidak berhak justru menerima bantuan (*inclusion error*) , hal ini sering disebabkan oleh data yang tidak akurat, pendataan yang tidak objektif, hingga intervensi kepentingan politik atau personal dari pelaksana. Ketika ketidaktepatan sasaran terjadi, muncullah kecemburuan sosial, yaitu perasaan iri, tidak puas, dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat akibat persepsi ketidakadilan. Hal ini dapat menimbulkan: Ketegangan antar tetangga atau warga satu RT/RW,Turunnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, Protes dan konflik horizontal dan Gangguan terhadap kohesi sosial di masyarakat .

a. Contoh pertama Konkret dari Penelitian di Desa Rancaekek Kulon Contoh 1: Warga Miskin Tidak Mendapatkan Bantuan.

> *"Saya buruh serabutan, istri tidak kerja, anak dua. Tapi nama saya tidak ada di daftar. Yang Punya motor dua dan rumah bagus malah dapat " (Wawancara Warga RW 03).*

Ini menunjukkan exclusion error dan Menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan sosial, karena warga yang benar-benar miskin merasa tidak dihargai dan tidak dianggap.

b. Contoh kedua : Keluarga Perangkat Desa atau RT Menerima Bantuan

> *"Kami heran, keluarga RT justru masuk daftar bantuan, padahal mereka usahanya lancar. Kayaknya karena mereka dekat dengan perangkat desa."(Wawancara warga RW 05).*

Muncul dugaan nepotisme dan manipulasi data dan Menyebabkan kecemburuan dan tuduhan tidak adil, yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses kebijakan. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial secara langsung menciptakan kecemburuan sosial yang berdampak pada:Kerusakan relasi sosial antarwarga, Menurunnya legitimasi kebijakan dan berkurangnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa

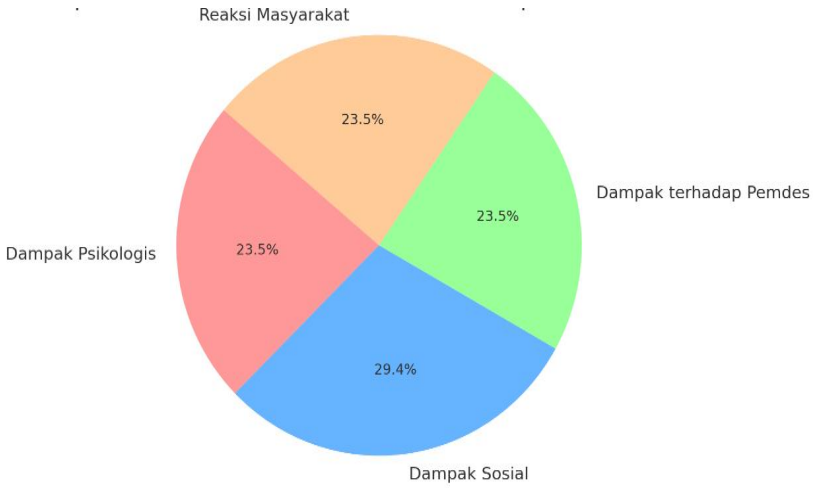
Berikut adalah solusi kebijakan untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dalam hubungannya dengan kecemburuan sosial berdasarkan hasil temuan di Desa Rancaekek Kulon yaitu : Perbaikan dan Pemutakhiran Data Secara Berkala (DTKS), Transparansi dan Sosialisasi Terbuka, Penguatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pelaksana, Mekanisme Pengaduan yang Mudah Diakses, Penegakan Sanksi bagi Manipulasi atau Pelanggaran.

Implementasi Kebijakan Publik di dalam mengintesvigasi bantuan sosial apabila tidak tepat sasaran akan menimbulkan kecemburuan sosial seperti yang diterangkan pada tabel 1.

Tabel.1 Kecemburuan Sosial Dalam Masyarakat Desa Akibat Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial

NO	ASPEK	PENJELASAN
1	**Faktor Pemicu**	● Bantuan diterima oleh warga yang tergolong mampu (misalnya memiliki rumah permanen, kendaraan bermotor) ● Warga miskin tidak menerima bantuan
2	**Dampak Psikologis**	● Rasa iri dan kecewa pada warga yang tidak menerima bantuan ● Turunnya kepercayaan terhadap aparat desa
3	**Dampak Sosial**	● Retaknya hubungan sosial antar warga ● Munculnya konflik terbuka atau diam-diam antar tetangga ● Menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan desa
4	**Dampak terhadap Pemerintah Desa**	● Hilangnya legitimasi sosial pemerintah desa ● Tuduhan adanya nepotisme atau manipulasi data penerima bantuan
5	**Reaksi Masyarakat**	● Protes terbuka atau diam-diam ● Penyebaran isu/fitnah di media sosial lokal ● Penolakan program pemerintah lainnya
6	**Upaya Pencegahan**	● Perbaikan data penerima (DTKS) ● Pelibatan tokoh masyarakat dalam validasi data ● Transparansi dan sosialisasi kriteria penerima

Gambar 1 Distribusi Kecemburuan Sosial Akibat Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial



Grafik 1 Grafik Penerima Bansos dan Jumlah yang Tidak Tepat Sasaran (2020 - 2024)



3. Evaluasi Terhadap Model Van Meter Dan Van Horn Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung.

Penyaluran bantuan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Agar pelaksanaannya efektif, Penelitian ini fokus pada model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berinteraksi yaitu :

3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives):

Sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dirumuskan secara jelas dan dapat diukur. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives) merupakan variabel pertama dan paling mendasar yang memengaruhi keberhasilan implementasi.Variabel ini berkaitan dengan seberapa jelas, konsisten, dan terukur arah kebijakan yang ingin dicapai.

3.2 Sumber Daya (Resources):

Meliputi dana, staf, informasi, fasilitas, dan otoritas hukum yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan. merupakan variabel kedua yang sangat krusial dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Sumber daya di sini tidak hanya terbatas pada dana, tetapi juga mencakup berbagai elemen lain yang dibutuhkan oleh pelaksana untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

3.3 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (Inter-organizational Communication and Enforcement Activities):

Kejelasan informasi antar aktor pelaksana dan koordinasi yang baik menjadi kunci.Variabel ini menekankan pentingnya alur komunikasi yang jelas, konsisten, dan fungsional antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi**,** serta bagaimana pengawasan dan penegakan aturan dilakukan selama pelaksanaan kebijakan.

3.4 Karakteristik Badan Pelaksana (Characteristics of the Implementing Agencies):

Struktur birokrasi, kompetensi SDM, dan orientasi pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Variabel ini merujuk pada struktur organisasi, budaya kerja, kapasitas kelembagaan, serta sikap internal lembaga pelaksana**,** yang semuanya sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

3.5 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Environment):

Konteks eksternal yang memengaruhi proses pelaksanaan, seperti kondi masyarakat tekanan politik, dan ekonomi lokal. Variabel ini menggambarkan konteks eksternal di mana kebijakan dijalankan. Meskipun faktor ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pelaksana**,** ia sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

3.6 Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition of Implementers):

Kesediaan, sikap, dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan Variabel ini merujuk pada sikap mental, komitmen, dan orientasi pelaksana kebijakan terhadap tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kebijakan. Meskipun kebijakan dirancang dengan baik dan didukung sumber daya, jika para pelaksana tidak memiliki disposisi yang positif, implementasi akan terganggu.

4. Alternatif Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mengintesvigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi model Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam distribusi bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung masih perlu perbaikan. Pembaruan data penerima manfaat secara berkala, peningkatan kapasitas aparat desa, serta pengawasan dari pihak independen sangat diperlukan untuk menghindari ketidaktepatan dalam administrasi dan lemahnya akuntabilitas yang dapat menyebabkan penyimpangan, mengurangi efektivitas bantuan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

a. Digitalisasi Administrasi: Manfaatkan aplikasi atau sistem informasi desa untuk mencatat penyaluran secara langsung dan terintegrasi.
b. Pelatihan Aparatur Desa: Tingkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan.
c. Transparansi Publik: Tempelkan daftar penerima bantuan dan laporan distribusi di lokasi umum atau situs resmi desa.
d. Penguatan Mekanisme Pengaduan: Sediakan saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian.

Saran untuk Perbaikan :

a. Penjadwalan yang Terintegrasi: Jadwal distribusi perlu disusun secara kolaboratif antara pusat, daerah, dan desa sejak tahap awal.
b. Optimalisasi Rantai Distribusi: Kurangi birokrasi dalam penyaluran bantuan dan percepat proses verifikasi dengan memanfaatkan teknologi.
c. Sistem Peringatan Dini: Kembangkan sistem pelaporan awal untuk mengidentifikasi hambatan dalam distribusi, sehingga solusi dapat segera ditemukan.
d. Pemantauan Secara Real-Time: Implementasikan sistem pelacakan distribusi bantuan berbasis digital agar semua pihak dapat memantau jadwal dengan efektif.

5. Refleksi Terhadap Implementasi Kebijakan Nasional Bantuan Sosial Di Wilayah Lain, Khususnya Dalam Konteks Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran. Refleksi Ini Mengacu Pada Kerangka Van Meter & Van Horn (1975) Untuk Membantu Menelaah Aspek Implementasinya.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT, dan lainnya) bertujuan mengurangi kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial. Namun, di berbagai daerah terjadi ketidaktepatan sasaran yang menimbulkan ketidakadilan sosial, konflik horizontal, dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Refleksi Implementasi di Wilayah Lain (Contoh Kasus):Contoh: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

5.1 Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan bantuan jelas: menurunkan angka kemiskinan, namun standar penerima manfaat tidak dipahami oleh masyarakat dan aparat desa, Implementasi yang berhasil membutuhkan standar dan tujuan kebijakan yang jelas, realistis, terukur, dan dapat dipahami oleh semua pelaksana. SDM terbatas, terutama dalam validasi data rumah tangga miskin dan Fasilitas pendataan (seperti perangkat digital atau internet desa)

tidak merata, menyebabkan pengisian data manual rentan manipulasi. Sumber daya yang memadai (dana, tenaga manusia, informasi, sarana prasarana) adalah syarat mutlak bagi keberhasilan implementasi.

5.2 Komunikasi Antar Organisasi

Minimnya koordinasi antara pusat, dinas sosial kabupaten, dan pemerintah desa, Petunjuk teknis sering berubah-ubah tanpa pendampingan atau sosialisasi yang memadai. Komunikasi yang efektif, jelas, dan konsisten antar organisasi serta antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting.

5.3 Karakteristik Badan Pelaksana

Beberapa aparat desa menunjukkan kurangnya kapasitas teknis dan sensitivitas sosial terhadap urgensi program, di beberapa kasus, intervensi tokoh lokal atau elite desa memengaruhi siapa yang masuk daftar penerima. Struktur organisasi, kewenangan, kapasitas birokrasi, serta kepemimpinan sangat memengaruhi implementasi.

Kondisi Sosial-Ekonomi-Politik Ketimpangan sosial dan budaya patron-klien masih kuat, membuat proses seleksi penerima kadang tidak berbasis data, melainkan relasi kekuasaan. tekanan politik lokal juga berpengaruh pada distribusi bantuan menjelang pemilu. Lingkungan eksternal yang kondusif (dukungan masyarakat, stabilitas politik, kondisi ekonomi) akan memperlancar implementasi

5.4 Disposisi Pelaksana

Ada pelaksana yang merasa program ini bukan kewenangannya secara langsung, sehingga kurang antusias dan hanya menjalankan “asal selesai”, Sebagian lagi menunjukkan dedikasi tinggi tetapi terhambat oleh sistem dan perintah atasan. Komitmen, pemahaman, dan sikap positif pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan hasil implementasi

PENUTUP

Ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung, disebabkan oleh berbagai faktor. Ketidaktepatan Data Penerima (DTKS Tidak Akurat), KKN dan Nepotisme dalam Penentuan Penerima, Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat, tumpang tindih dan Ketidaksinkronan Program , Politik Uang dan Pragmatisme Pemilih, Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa dan Keterlambatan serta Ketidakteraturan Penyaluran . Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa ketidak tepatan penyaluaran bantuan sosial di desa Rancaekek Kulon disebabkan tidak

adanya pembaharuan data karena kurangnya koordinasi antar organisasi, kurangnya Transparansi dan partisipasi menyebabkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan kenyataan di lapangan tidak menerima hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, ketidak sinkronan program menyebabkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin tidak tercapai. politik uang dan pargmatisme pemilih menyebabkan ketidak tepatan sasaran penyaluran bantuan, keterbatasan aparatur desa menyebabkan keterbatasan pembaharuan data sehingga menyebabkan ketidak tepatan dan keterlambatan didalam penyaluran nya sehingga Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penerapan kebijakan publik yang mencakup Standar dan Tujuan Kebijakan ,Sumber Daya , Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana , Karakteristik Badan Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, dan dan Disposisi atau Sikap Pelaksana **.** Dengan adanya penerapan Teori dari Van Meter dan Van Horn , diharapkan masalah ketidaktepatan di dalam penyaluran bantuan sosial dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Rancaekek Kulon dapat terjamin dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

Alba, A. (2018). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, *4*(1), 72-89.

Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *4*(2), 98-115.

Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, *6*(1), 1.

Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di desa pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *15*(2), 31-44.

Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, *13*(4), 338-345.

Ruyani, N. R., Duriat, A., Mariane, I., & Sumiaati, I. (2023). implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di kelurahan antapani kidul kecamatan antapani kota bandung. *neo politea*, *4*(1), 24-32.

Supit, B. F., & Lumingkewas, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Minahasa. *Academy of Education Journal*, *14*(2), 1059-1068.

Sitanggang, B. (2014). *Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).

Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(108).

Wibawa Samodra. Et.Al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Yandianto. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Percetakan Bandung.